

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA (PMBRW)

Rafiah Putri

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: This research was conducted in the sub-district of the city of Pekanbaru. The purpose of this research is to find out how the PMBRW program in Pekanbaru City is and what is the obstacle of the PMBRW program in Pekanbaru City. Data collection techniques in this study were direct interview techniques to program implementers. While the types and sources of data in this study are primary data and secondary data. Then the analysis of the data that the writer uses is descriptive qualitative, the data obtained is analyzed by describing and presenting with theories in accordance with the existing problems. Based on the results of this study it can be concluded that the Community Empowerment Bebrasis Community Empowerment Program (PMBRW) is a Pekanbaru city government program with Perda Number 05 of 2016 in an effort to improve the community's economy, this program is a stimulate program. Implementation of the PMBRW program has many obstacles from context, input, process and product. As for the writer's suggestion that there is a need for improvement in the program due to the community's understanding of the program which is minimal, as well as in achieving the program's goals this is not implemented due to lack of cooperation. The need to prioritize the development of regional potential supported by local wisdom.

Abstrak: Penelitian dilaksanakan di Kecamatan se-lingkungan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana program PMBRW di Kota Pekanbaru serta apa yang menjadi penghambat dari program PMBRW di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan adalah teknik wawancara langsung kepada pelaksana program. Adapun jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Dan kemudian analisis data yang gunakan deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dianalisa dengan menguraikan serta menyajikan dengan teori-teori yang tepat dengan permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan program Pemberdayaan Masyarakat Bebrasis Rukun Warga (PMBRW) ialah program pemerintah Kota Pekanbaru dengan Perda Nomor 05 Tahun 2016 dalam upaya meningkatkan ekonomi maskyarakat, program ini ialah program stimulat. Pelaksanaan program PMBRW memilki banyak penghambat dari konteks, masukan, proses maupun produk. Adapun saran penulis yaitu perlu adanya perbaikan pada program tersebut dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap program yang minim, serta pada pencapaian tujuan program tidak terlaksana hal ini dikarenakan kurangnya kerja sama. Perlunya mengedepankan pengembangan potensi wilayah yang didukung dengan kearifan lokal.

Kata Kunci: kebijakan publik, evaluasi, program PMBRW, kearifan lokal

PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena meningkatkan kekuasaan bagi mereka yang kurang beruntung ataupun tidak mendapatkan kesempatan sebelumnya dan pengembangan potensi bagi masyarakat itu sendiri. Masyarakat tersebut dapat mrnunjukan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Dikeluarkanlah keputusan walikota Kota Pekanbaru dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, setiap daerah memiliki strategi dalam meningkatkan perekono-

mian dan pembangunan daerahnya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa setiap daerah memiliki wewenang dalam mengatur daerahnya termasuk membuat suatu kebijakan dalam bentuk suatu program atau strategi yang guna meningkatkan pembangunan dan perekonomian, agar dapat terwujudnya masyarakat yang madani sesuai dengan visi dan misi Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru salah satu daerah yang saat ini sedang berkembang yang diikuti dengan berkembangnya daerah kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru dalam tempo yang cepat. Keadaan ini di iringi dengan percepatan pertumbuhan penduduk serta jumlah pekerja, maka akan meningkat tuntutan terhadap berbagai

kebutuhan hidup yang semakin sulit dicapai. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup merupakan suatu fenomena yang harus dihadapi setiap masyarakat terkhususnya masyarakat Kota Pekanbaru. Pekanbaru memiliki 12 Kecamatan dengan luas wilayah sebesar 632,26 km² atau 0,71 persen dari total luas wilayah Provinsi Riau. Tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 ialah 2,14%, menandakan bahwa kehidupan di Kota Pekanbaru masih tidak terlepas dari kemiskinan

Potensi Wilayah Kota Pekanbaru ialah sektor Perdagangan berupa Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel sektor ini merupakan sektor yang paling dominan dalam menyerap tenaga kerja di Kota Pekanbaru. Pada tahun 2018, berdasarkan hasil Rakernas 2018 sektor ini menyerap tenaga kerja sebanyak 202.993. Sedangkan sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan berada di posisi kedua, yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 132192 orang, sedangkan posisi ketiga adalah sektor Bangunan, yang menyerap tenaga kerja sebanyak 45777 orang. Dari data tersebut menunjukkan perlunya penyiapan sumberdaya manusia yang handal. Untuk itu Program PMBRW merupakan suatu program yang tepat untuk masyarakat Kota Pekanbaru.

PMBRW adalah salah satu wujud kongkrit dari program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya mengecilkan grafik kemiskinan serta memberdayakan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah diharapkan dapat merubah kehidupan ekonomi lebih baik dan pola pikir mereka dapat meningkat dengan adanya PMBRW. Program PMBRW menciptakan kerukunan, keamanan, kedamaian, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru, dan menciptakan lingkungan bersih, sehat dan asri. Oleh karena itu, masyarakat harus ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan Program PMBRW ini agar tujuan dari Program PMBRW tersebut tercapai. PMBRW prinsipnya merupakan upaya dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro (UMKM). Sehingga, nantinya masyarakat

akan mampu mandiri dan turut serta dalam membangun Kota Pekanbaru.

Fenomena yang terjadi pada pelaksanaan program PMBRW, yaitu sosialisasi yang dilaksanakan pada masyarakat belum sepenuhnya diterima dan dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat pada kegiatan ini hanya sekedar mengikuti program kegiatan saja, dan tidak memiliki keterampilan. Belum mampu membuka peluang usaha dari keterampilan mereka ikuti dari pelatihan tersebut, belum sesuai dengan konsep pemberdayaan. Pada pelaksanaan Program PMBRW ini sendiri banyak pihak yang dilibatkan mulai dari masyarakat, RT dan RW, LPM, LKM, FORUM RT serta dengan adanya program ini dapat menjadi penunjang penguat lembaga lainnya seperti UEK-SP, KUB, Koperasi, OMS dan lainnya akan tetapi belum tampak pengaruh dari program ini serta terjadi tumpang tindih pengorganisasian dipemerintahan yang dinilai membilit tali pemerintahan.

Program PMBRW guna pengembangan wilayah dengan potensi wilayah tersebut akan tetapi pada realisasinya di masing masing kecamatan program senantiasa tidak ada variasi sebatas formalitas pelaksanaan program. Serta sasaran program yang belum optimal dalam upaya memberantas kemiskinan. Dengan pelaksanaan Program PMBRW di Kota Pekanbaru seharusnya mampu mengangkat perekonomian masyarakat karena partisipasi masyarakat langsung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau tingkat kemiskinan pada tahun 2019 Kota Pekanbaru yaitu 2,14%.

METODE

Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif telah dilaksanakan di lingkungan se-Kecamatan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan lukisan ataupun gambaran dengan sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta keterkaitan antara fenomena yang ada mengenai PMBRW di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara langsung dengan orang yang berkaitan langsung ditentukan melalui teknik *sampling incidental*, yakni mengambil sampel orang yang mudah ditemui

dan mengetahui PMBRW dan melakukan analisa dokumen disertai observasi untuk mempertajam analisa dengan teknik trigulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMBRW) merupakan program yang di buat oleh Pemerintah Pekanbaru dalam upaya melakukan pembangunan Kota Pekanbaru yang lebih baik sejalan dengan pendekatan Pembangunan Kota Pekanbaru Kota Modern, yaitu Smart City, Liveable City, Dan Green City.

Pemberdayaan masyarakat berbasis rukun waga (PMBRW) yang dimaksud ialah :

1. Peningkatan sumber daya manusia
 - a. Peningkatan kualitas kesehatan melalui promotif, preventif, dan kuratif.
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan melalui formal dan pelatihan.
 - c. Penanaman keimanan kepada generasi muda dan pematapan keimanan kepada masyarakat serta pelestarian budaya.
2. Peningkatan ekonomi kerakyatan
 - a. Program UMKM, industry rumah tangga, industry kreatif, pertanian, pembinaan praktek kerja lapangan.
 - b. Bantuan permodalan melalui dana APBD, lembaga keuangan dan donasi masyarakat
3. Penguatan kelembagaan masyarakat
 - a. Lembaga ekonomi (Koperasi, KUB, UEK-SP, Dll)
 - b. Lemabaga keagamaan (MUI, FKUB, dll)
 - c. Lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan (OMS, Karang Taruna, KNPI)
 - d. Lembaga profesi (NHIPMI, GAPENSI, REI, dll)

Visi program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga adalah “muwujudkan masyarakat kota pekanbaru yang madani di mulai dari rukun warga” mempunyai makna arti mewujudkan merupakan cita cita pemimpin Kota Pekanbaru melalui proses Tridaya agar terwujud masyarakat yang bedaya, rukun, sejahtera dan lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Masyarakat madani adalah hasil akhir dari dua pendekatan pemberdayaan sehingga menghasilkan tatanan masyarakat yang berkualitas, yaitu masyarakat mandiri, tangguh, dan berdaya

saing secara lokal, nasional dan internasional.

Misi program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga yang pertama untuk melaksanakan suatu program yang didukung dengan data-data eksisting di masing-masing RW meliputi Peta Rona, Data Demografi, dan Rencana Penataan Kawasan (RPK RW). Kedua hasil pelaksanaan Tridaya diharapkan terbentuk masyarakat madani.



Gambar 1. Sasaran dan tujuan PMBRW

Evaluasi program bertujuan melihat bagaimana penyelenggaraan dari program tersebut. Dari hasil evaluasi dapat memberikan keputusan mengenai program tersebut, apakah diteruskan, atau diteruskan dengan sebuah perbaikan, atau mungkin dihentikannya program tersebut.

1. Evaluasi Konteks

Konteks evaluasi membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan digapai program dan merumuskan tujuan. Evaluasi konteks melihat tujuan dari kondisi eksternal dan internal. Evaluasi konteks fokus peluang dan keperluannya. Evaluasi ini mengkaji kekuatan dan kelemahan. Program PMBRW masih banyak perbaikan yang perlu dilaksanakan, kelemahannya ialah:

- a. Pemasalahan anggaran yang minim, mengakibatkan peserta terbatas, serta program pelatihan yang dilakukan hanya disesuaikan dengan fasilitas yang seadanya.
- b. Pelaksanaan pelatihan hanya dilakukan satu kali saja. Apabila pelatihan membengkak maka tidak efektif dilakukan hanya satu kali. Sebaiknya pelatihan seperti otomtif dilakukan lebih dari 3 kali.
- c. Daya minat masyarakat untuk mandiri yang kurang, ketika mengikuti sebuah pelatihan yang diadakan tidak ada dampak action dari

masyarakat. Serta Pola pikir masyarakat yang masih salah dimana ketika mengikuti sebuah pelatihan hanya berorientasi pada insentif.

- d. Sasaran yang tidak tepat dikarenakan kebanyakan yang mengikuti program pelatihan tersebut hanya ibu-ibu atau bapak bapak yang menghabiskan waktu saja.
- e. Tidak adanya program lanjutan pada pelatihan, perlunya bimbingan lagi oleh pihak terkait untuk membimbing masyarakat yang telah ikut serta. Agar ilmu yang diserap dapat dimanfaatkan ataupun disalurkan sesuai bidang, perlunya kerjasama dengan berbagai pihak.

Sedangkan kelebihan dari program PMBRW ialah:

- a. Merupakan program unggulan Kota Pekanbaru, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi program yang akan dilaksanakan. Dimana konsepnya dari masyarakat untuk masyarakat. RT sebagai organisasi terkecil di lingkungan dapat mengetahui kebutuhan masyarakatnya.
- b. Program ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta membentuk lingkungan yang lebih rukun karena terjadinya kerjasama antar masyarakat.
- c. Adanya musyawarah antara RT dan RW maupun RW dan RW karena sikap gotong royong dan saling membahu kerjasama untuk keberhasilan wilayah.
- d. Memberikan skill kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dampak dari program, PMBRW belum begitu signifikan, hal ini ditunjukkan dari belum begitu berdampak pada lingkungan sekitar. Masyarakat mengimplementasikan pelatihan tersebut dirumah. Dan sebagian dari masyarakat tidak mampu mengimplementasikan karena tidak memiliki alat/bahan baku untuk mengimplementasikan latihan seperti pelatihan bengkel tidak adanya kelengkapan alat untuk membuat usaha, masyarakat terhenti dipelatihan.

2. Evaluasi Masukan

Evaluasi mengatur keputusan, menentukan sumber diperlukan, pilihan yang akan diambil serta rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan dan prosedur kerja. Sumber daya manusia merupakan unsur pada penyelenggaraan program

dikarenakan manusia sendiri sebagai penyelenggara program. Bahwa dalam program PMBRW ini memiliki tenaga khusus untuk melaksanakan program yakni pendamping PMBRW di pihak kecamatan dan kelurahan. Penyusunan anggaran di bantu oleh bendahara kecamatan disetujui oleh Camat. Di Kelurahan yang menghandel yakni Lurah tersebut. Adanya koordinasi antara pihak kecamatan dan kelurahan. Selain itu adanya pengawasan dari Bappeda dibantu pendamping program PMBRW.

Pendanaan merupakan aspek penting pada penyelenggaraan sebuah program. Karena program tidak mungkin berjalan tanpa adanya sebuah dana, berlangsungnya program dilakukan setelah adanya dana. Jabaran dari Perwako No. 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Kegiatan Program PMBRW dana program berasal dari APBD Kota Pekanbaru, APBD Provinsi, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Dari temuan dijumpai oleh penulis bahwa kendala dana ialah dimana jumlah dana pada pengajuan yang diajukan berkurang sangat jauh.

Selain itu dana tersebut akan cair pada TW II ataupun TW III. Dana yang sampai kepada pihak kecamatan yang minim membuat program yang dilakukan tidak maksimal karena berubah jauh dari jumlah anggaran semula. Contohnya jumlah awal akan melaksanakan pelatihan dengan jumlah peserta 30 orang dikurangkan menjadi 20 orang saja atau dilakukan dengan alternative lain yang dapat diakali oleh instansi itu. Bisa juga mengurangi anggaran snack menjadikan ke jumlah peserta lebih banyak. Adanya keberagaman pelaksanaan tanggal pelaksanaan program PMBRW di Kota Pekanbaru hal ini karena disesuaikan dengan pihak pelaksana kegiatan. Selain itu jumlah hari ditentukan dari pengusulan program yang diajukan. Adanya peran aktif Camat dan Lurah menentukan strategi pelaksanaan program ini.

3. Evaluasi Proses

Evaluais proses mengimplementasikan program. Sampai sejauh mana rencana telah dilaksanakan, perlunya perbaikan melihat sejauh mana, begitu pertanyaan tersebut dapat dijawab,

prosedur dapat dilakukan monitor, kontrol, dan evaluasi segera.

Perencanaan program ini merupakan usulan dari masyarakat sendiri, dimana masyarakat paling paham dengan kebutuhan sekitar. Usulan akan disampaikan oleh RT dan pengusulan melalui RW. Pihak kelurahan menampung aspirasi, pada rapat bersama yang dihadiri oleh semua RT/RW di lingkungan sekitar mengenai kumpulan usulan tadi digodok menjadi beberapa urusan prioritas. Setelah itu kecamatan akan melakukan rapat koordinasi kembali maka diambil keputusan mana yang terbaik untuk bersama, dan diusulkan kegiatan tersebut untuk dapat dilaksanakan tahun depan.

Target pelaksanaan program ini ialah masyarakat Kota Pekanbaru, dimana masyarakat sebagai penguat perekonomian dengan adanya pelatihan ini dapat mampu mengembangkan keahlian dan melaksanakan praktek dilapangan untuk membuka usaha mulai dari home industry. Pada pelatihan yang diadakan merupakan usulan dari masyarakat sendiri, dimana dalam kegiatan tersebut disesuaikan kebutuhan pesertanya contoh pada pelatihan memasak maka peserta wanita kebanyakan, dan pada pelatihan perbengkelan ialah laki laki dan pada latihan berkebun ialah semua kalangan ikut serta.

Pihak kecamatan dan pihak kelurahan saling berkoordinasi, kecamatan melakukan pemantauan pada pelaksanaan program dengan hadir di acara pembukaan dan penutupan program pelatihan, serta mengawasi kegiatan tersebut. Pihak kecamatan juga akan memintak laporan kegiatan dan BAP, disertai bukti dokumentasi.

4. Evaluasi Produk

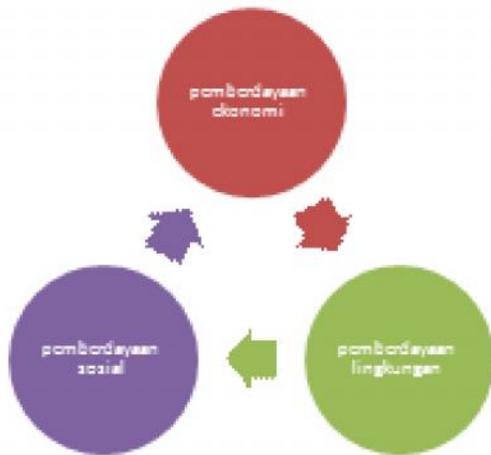
Tujuan dari pemberdayaan sosial ialah kerukunan antara masyarakat, kesetiakawanan sosial. dalam program PMBRW. Dimana masyarakat terjalin hubungan yang baik meningkatkan nilai budaya Indonesia dengan kearifan lokal kota Pekanbaru. Terjadinya peningkatan dari pemberdayaan sosial yaitu masyarakat aktif dalam lingkungan sosial ikut serta, peka terhadap lingkungan dengan mengikuti musyawarah, gotong royong dan kerja bakti. Sebagian besar dari kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru me-

iliki pola pikir yang belum berubah, masyarakat mengikuti pelatihan hanya sekedarnya, masyarakat tidak memiliki kemauan yang kuat untuk maju dan berkembang. Dilihat dari antusias masyarakat ikut serta tinggi tapi tidak mendalami ataupun memahami tujuan program ialah memberikan pengalaman dan pembelajaran bekal untuk masyarakat membuka usaha. Pada program PMBRW masyarakat berperan aktif untuk peka terhadap lingkungan, dengan adanya gotong royong, musyawarah hubungan yang baik antara sesama masyarakat dan masyarakat ke pemerintah menciptakan ketertiban lingkungan sosial yang baik.

Pemberdayaan ekonomi berdasarkan hasil pengamatan serta wawancara oleh peneliti dapat disimpulkan masyarakat belum mandiri dan sadar dari fasilitas yang pemerintah sediakan, masyarakat membutuhkan motivasi yang lebih lagi. Setelah adanya pelatihan masyarakat kerap menunggu, masyarakat belum memahami betul apa yang dibutuhkan dan diperlukan. Kemandirian membuka peluang usaha yang belum dilihat oleh yang mengikuti pelatihan. Belum adanya tidak lanjut setelah program dilaksanakan, hal ini dikarenakan pelatihan yang singkat dan tidak maksimal. Daya saing masyarakat yang rendah untuk maju. Tidak adanya kegiatan ekonomi yang diharapkan tumbuh dimasyarakat karena banyak faktor, salah satu sikap masyarakat yang mengharapakan keberlanjutan dari program seperti bantuan.

Program PMBRW merupakan program dimana masyarakat berpartisipasi langsung, mulai dari usulan pelaksanaannya, maka pada pengusulan kegiatan pelatihan yang di adakan RT/RW kerap kali hanya itu itu saja kurang variasi dinilai pada pengusulan tidak memperhatikan aspek potensi wilayah, suka memilih kegiatan yang monoton serta kurangnya gebrakan baru. Pelatihan yang diadakan sesuai dengan hasil usulan tapi belum sesuai dengan aspek pemanfaatannya. Kota Pekanbaru merupakan wilayah yang dapat dikembangkan melalui jasa dan perdagangan, akan lebih baik focus bagaimana menumbuhkan wirausahaan yang handal sesuai dengan persaingan saat ini di Kota Pekanbaru. Program PMBRW dibuat sedemikian rupa dan

berkesinambungan dengan program lain seperti UEK-SP, KUBE, Koperasi, OMS dan LKM, LPM dan lainnya. Pemberdayaan lingkungan belum terlihat jelas, hal ini dikarena masyarakat hanya melakukan gotong royong bukan dari hasil pelatihan PMBRW. Pemberdayaan lingkungan yang dimaksud ialah output dari segala kegiataan yang menciptakan wilayah yang bersih sehat dan asri melalui peningkatan saran prasarana & kelestarian lingkungan. Program ini diciptakan dengan tiga tujuan yang saling berkaitan akan tetapi dikarenakan pada output sersebut tidak maksimal secara keseluruhan.



Gambar 2. Kesiambungan Tujuan Program

Peneliti menjelaskan bahwa pada gambar merupakan suatu rangkaian kegiataan yang saling berhubungan erat. Dapat berjalan maksimal dimulai dari masyarakat dan untuk masyarakat oleh masyarakat. Program PMBRW ialah program stimulas atau rangsangan oleh pemerintah dengan konsep masyarakat sebagai aktor serta perancang program.

Program PMBRW ialah program Pemerintah Pekanbaru di dasar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 guna meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Pekanbaru dengan visi mewujudkan penataan kawasan rukun warga menuju metropolitan yang madani (2012-2017) dan terwujudnya Pekanbaru sebagai smart city yang madani (2018-2022). Dari hasil penelitian maka Evaluasi pada program PMBRW di Kota Pekanbaru secara keseluruhan ialah

- a. Pemasalahan anggaran yang minim, mengakibatkan peserta terbatas, serta program

pelatihan yang dilakukan hanya disesuaikan dengan fasilitas yang seadanya.

- b. Pelaksanaan pelatihan hanya dilakukan satu kali saja. Apabila pelatihan membengkel maka tidak efektif dilakukan hanya satu kali. Sebaiknya pelatihan seperti otomotif dilakukan lebih dari 3 kali.
- c. Daya minat masyarakat untuk mandiri yang kurang, ketika mengikuti sebuah pelatihan yang diadakan tidak ada dampak action dari masyarakat. Serta pola pikir masyarakat yang masih salah dimana ketika mengikuti sebuah pelatihan hanya berorientasi pada insentif.
- d. Sasaran yang tidak tepat dikarenakan kebanyakan yang mengikuti program pelatihan tersebut hanya ibuk ibuk atau bapak bapak untuk menghabiskan waktu saja.
- e. Tidak adanya program lanjutan pada pelatihan, perlunya bimbingan lagi oleh pihak terkait untuk membimbing masyarakat yang telah ikut serta. Agar ilmu yang diserap dapat dimanfaatkan ataupun disalurkan sesuai bidang, perlunya kerjasama dengan berbagai pihak.

Sedangkan kelebihan dari program PMBRW ialah :

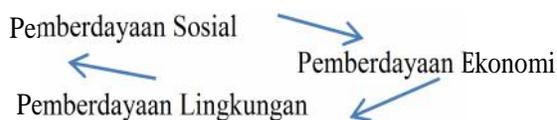
- a. Merupakan program unggulan Kota Pekanbaru, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi program yang akan dilaksanakan. Dimana konsepnya dari masyarakat untuk masyarakat. RT sebagai organisasi terkecil di lingkungan dapat mengetahui kebutuhan masyarakatnya.
- b. Program ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta membentuk lingkungan yang lebih rukun karena terjadinya kerjasama anatar masyarakat.
- c. Adanya musyawarah antara RT dan RW maupun RW dan RW karena sikap gotong royong dan saling membahu kerjasama untuk keberhasilan wilayah.
- d. Memberikan skill kepada masyarakat yang membutuhkan.

Banyak peluang yang dapat dikembangkan dari program PMBRW ini apabila dapat dimanfaatkan dengan baik, karena program ini merupakan program stimulat dari pemerintah guna memajukan masyarakat. Program PMBRW merupakan program memiliki tujuan dan sasaran

yang akan dicapai, yakni pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan.

Pada fakta lapangan menunjukkan bahwa tujuan tersebut tidak maksimal dicapai karena pada perencanaan dan pelaksanaan yang belum sesuai dengan kaedah, yaitu meningkatkan ekonomi dan mengembangkan potensi daerah. Program tersebut lebih seperti seremoni belaka dan masyarakat tidak mau bangkit dan tidak peka pada lingkungan.

Pemberdayaan yang dimaksud pada tujuan program ini saling berkesinambungan, dimana apabila adanya hubungan sosial yang baik kerukunan dan kepekaan masyarakat pada lingkungan akan menciptakan kesiapan dari masyarakat itu sendiri dalam menghadapi persaingan saat ini dan terjadinya ide-ide baru untuk menjadi agen perubahan yang meningkatkan ekonomi masyarakat melalui home industri yang dikembangkan menjadi KUB menghidupkan suatu wilayah menciptakan keharmonisan disekitar dan lingkungan yang asri akan muncul.



Apabila siklus ini dijalankan maka bukan hanya kelompok saja yang terdampak tapi masyarakat sekitar juga ikut serta. Oleh karena itu, program PMBRW ini diperlukan kerja yang baik oleh semua pihak dikembangkan sesuai potensi wilayah. Dapat menjadi penopang mata pencarian masyarakat sekitar.

SIMPULAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) ialah program pemerintah Kota Pekanbaru dengan Perda Nomor 05 Tahun 2016 dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat, program ini ialah program stimulat. Pelaksanaan program PMBRW memiliki banyak penghambat dari konteks, masukan, proses maupun produk. Adapun saran penulis yaitu perlu adanya perbaikan pada program tersebut dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap program yang minim, serta pada pencapaian tujuan program tidak terlaksana hal ini

dikarenakan kurangnya kerjasama. Perlunya mengedepankan pengembangan potensi wilayah yang didukung dengan kearifan lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Badrudin, 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Cici Nopika Sari, 2017. *Efektifitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru*. Pekanbaru : Universitas Riau
- Dye, Thomas R, 1992. *Understanding Public Policy*. USA: Prentice-Hall, INC., Englewood Cliffs, NJ.
- Fitria Ramadayani, 2018. Efektivitas Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017. Pekanbaru: *Skripsi*, Universitas Riau.
- Jones, Charles O, 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Moh, 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pasolog, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Pujiyati, 2017. *Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Rumbai Pesisir*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Rusli, Zaili, 2014. *Pemeriksaan Masyarakat Konsep, Kebijakan dan Impelmentasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Siti Maisarah, 2017. *Dinamika Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PB-RW) Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: *Skripsi*, Universitas Riau
- Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau.

- Tayibnapi, Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrument Evaluasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2008. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Talgia, 2017. Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Renaissance*, Vol. 2 No. 02.
- Tisa Juniazti, 2017. *Partisipasi Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: JOM FISIP Vol. 4 No. 1 – Februari 2017
- Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.